

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis problematika kepemilikan hak cipta tanpa pencatatan ciptaan dalam konteks pembuktian sengketa di era digital dan aksesibilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menganut prinsip deklaratif yang menjamin perlindungan otomatis sejak fiksasi karya, pencipta menghadapi kendala yuridis dalam membuktikan orisinalitas tanpa surat pencatatan serta hambatan ekonomi dalam mengakses pembiayaan akibat disharmoni norma dengan persyaratan perbankan yang formalistik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis problematika yuridis-ekonomi untuk menemukan akar permasalahan dalam aspek pembuktian dan aksesibilitas pembiayaan, serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang ideal bagi pencipta tanpa pencatatan. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan filosofis dengan spesifikasi deskriptif-evaluatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat pencatatan sebagai *prima facie evidence* secara *de facto* menjadi penentu utama dalam persidangan meskipun secara *de jure* bersifat deklaratif, sementara ketiadaan standar valuasi baku menyebabkan marginalisasi pencipta dalam ekosistem ekonomi kreatif. Penelitian ini merumuskan konstruksi perlindungan hukum preventif melalui penguatan sistem pembuktian non-formal, harmonisasi regulasi multisektor, dan reformasi *substantive examination* oleh DJKI, serta perlindungan represif melalui penerapan sanksi tegas dan pembuktian terbalik dalam pembatalan pencatatan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pencatatan Ciptaan, Prinsip Deklaratif.

ABSTRACT

This research analyzes the problematic nature of copyright ownership without copyright registration in the context of dispute evidence in the digital era and accessibility to intellectual property-based financing schemes. Although Law Number 28 of 2014 adopts the declarative principle that guarantees automatic protection upon fixation of works, creators face juridical constraints in proving originality without registration certificates and economic barriers in accessing financing due to regulatory disharmony with formalistic banking requirements. The research objectives are to analyze juridical-economic problems to identify root causes in evidentiary and financing accessibility aspects, and to formulate ideal legal protection construction for creators without registration. This doctrinal research employs statutory, conceptual, case, and philosophical approaches with descriptive-evaluative-prescriptive specifications. Research findings indicate that the position of registration certificates as prima facie evidence de facto becomes the primary determinant in court proceedings despite being declarative de jure, while the absence of standardized valuation causes marginalization of creators in the creative economy ecosystem. This research formulates preventive legal protection construction through strengthening non-formal evidence systems, multi-sectoral regulatory harmonization, and substantive examination reform by the Directorate General of Intellectual Property, as well as repressive protection through strict sanctions and reverse burden of proof in registration cancellation.

Keywords: *Copyright, Copyright Registration, Declarative Principle.*